

**PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN DAN WISATA ALAM
DI KPHL MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

*(The Role Of Stakeholders In Forest Management And Natural Tourism In Kphl Mapilli,
Polewali Mandar District)*

Muhammad Sarif¹, Widyanti Utami A¹, Yulsan Demma Semu¹

¹Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat,
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Majene Sulawesi Barat, 91411
e-mail: sarifmuhammad47@gmail.com

ABSTRACT

Forests are natural resources that have various essential functions both ecologically and economically. This study aims to formulate a strategy for forest management and natural tourism that is appropriate to improve the community's welfare around the forest area. This research was conducted at Mapilli KPHL, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. Data collection uses in-depth interview techniques. Data analysis was carried out descriptively using the theory of stakeholders analysis Reed et al. 2009. The results showed ten forest management and tourism stakeholders in Mapilli KPHL, each of which had its own role and interests. Based on assessing the interests and strength of stakeholders in forest and tourism management classified as not yet effective.

Keywords: *Communication, Effectiveness, Gap analysis, Resources.*

ABSTRAK

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki berbagai fungsi penting baik secara ekologi maupun ekonomi. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan hutan dan wisata alam yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Penelitian ini dilakukan di KPHL Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan analisis stakeholder yang dikembangkan oleh Reed *et al.* 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh stakeholder pengelolaan hutan dan wisata di KPHL Mapilli, masing-masing stakeholder memiliki peran dan kepentingan sendiri. Berdasarkan penilaian kepentingan dan kekuatan stakeholder dalam pengelolaan hutan dan wisata tergolong belum efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, Gap analisis, Komunikasi, Sumberdaya.*

PENDAHULUAN

Hutan Indonesia adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *Megadiversity Country* (Hardjasoemantri, 1991). Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram.

Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (*Illegal Logging*). Pratiwi (2008), mengungkapkan bahwa pengusaha ekowisata dapat berperan besar sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik ketidakpastian akses terhadap kawasan. Selain itu pemberian peluang investasi berbasis pengelolaan hutan pada masyarakat dalam skema kemitraan dapat mewujudkan dampak yang luas bagi masyarakat sekitar kawasan KPHL (Golar dkk., 2021).

Munculnya ide pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL) disebabkan karena ketiadaan organisasi pengelola di tingkat tapak. Sehingga pengelolaan hutan belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek sumberdaya manusia, serta lemahnya dukungan politis untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengelolaan hutan (Kartodiharjo, 2008).

Kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung program yang terdapat di KPHL menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan hutan (Suharjito, 2017). Kehadiran KPHL sebagai sentra pengelolaan hutan di tingkat tapak belum diterima secara utuh oleh Kepala Daerah atau Dinas Kehutanan karena KPHL dianggap sebagai *cost centre* dan merugikan daerah karena penganggaran yang mengacu

pada rencana strategis dishut (Suwarno, 2014).

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Mapilli merupakan salah satu pengelolaan hutan yang diharapkan mampu menjadi sentra pengelola hutan yang lestari secara ekologi, sosial dan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar seperti yang dikemukakan Golar dkk., (2022), bahwa Peran KPH dibutuhkan di dalam penyelesaian konflik tenurial, terutama memfasilitasi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan secara kolaboratif dan memfasilitasi penerapan perhutanan sosial dalam bentuk skema-skema pemberdayaan dan kemitraan kehutanan.

Hal tersebut karena pada kawasan KPHL Mapilli memiliki potensi wisata alam yang dapat di *explore* lebih jauh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Sehingga dalam pengelolaan hutan perlu konsep kebijakan yang lebih memerhatikan masyarakat baik secara personal maupun kelompok untuk ikut berpartisipasi didalamnya (Subarsono, 2005).

Potensi wisata alam yang terdapat di KPHL Mapilli sangat beragam. Beragamnya wisata mulai dari wisata air terjun hingga wisata pantai. Namun permasalahan yang muncul adalah kurangnya keseriusan *stakeholder* dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan seperti pengelolaan wisata air terjun yang terdapat di kawasan KPL Mapilli hingga saat ini belum dikelola.

Informasi mengenai wisata yang berbasis pada sumberdaya alam yang terdapat di KPHL Mapilli belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, karena minimnya pengentahuan pengelola, rendahnya promosi, anggaran pengelolaan yang terbatas, sehingga mengakibatkan pengelolaan hutan dan wisata tersebut terhambat. Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran dan kepentingan stakeholder dalam pengelolaan hutan dan wisata alam di KPHL Mapilli.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPHL Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Juni 2018 sampai dengan Agustus 2018 waktu yang digunakan di atas mulai dari pengumpulan sampai pada analisis data.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamera digital, recorder dan *Global Positioning System (GPS)*. Bahan yang digunakan meliputi: kuesioner, peta dan bahan wawancara.

Metode Pengumpulan dan Sumber Data

Pengumpulan data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kajian literatur dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Gubernur, KPHL Mapilli, pelaku usaha kehutanan swasta, LSM kehutanan, dan akademisi kehutanan.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis stakeholder yang dikembangkan oleh Reed dkk., (2009) yaitu stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat menimbulkan dampak atau terkena dampak dari keberhasilan tujuan suatu organisasi. Teori ini digunakan untuk mengetahui peran dan kepentingan

stakeholder dalam pengelolaan hutan di KPHL Mapilli. Unsur penilaian dari atribut kepentingan meliputi; keterlibatan dalam pengelolaan hutan di KPHL Mapilli; manfaat yang didapatkan dari pengelolaan hutan wisata di KPHL Mapilli terhadap stakeholder yang terlibat; program kerja stakeholder dalam pengelolaan hutan di KPHL Mapilli; kesediaan partisipatif dengan stakeholder lain dan; kesesuaian tupoksi atau aturan kelembagaan stakeholder.

Unsur penilaian dari atribut pengaruh meliputi; pengaruh wewenang stakeholder; tipe tindakan dalam program; penguasaan sumberdaya strategis (sumberdaya manusia, dana, sarana dan prasarana, dan kelembagaan); bentuk keahlian yang dimiliki stakeholder serta; pengaruh stakeholder dalam keberlangsungan/kontinuitas pengelolaan hutan di KPHL Mapilli. Nilai yang didapatkan paling tinggi untuk setiap stakeholder adalah 25 poin pada atribut kepentingan dan 25 poin pada atribut pengaruh. Poin yang didapatkan merupakan hasil dari wawancara terhadap kesesuaian kepentingan dan pengaruh stakeholder terhadap unsur dan sub-unsurnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan hutan di KPHL Mapilli

1. Identifikasi Stakeholder

Hasil temuan di lapangan terdapat 10 stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan hutan dan wisata di KPHL Mapilli, berasal dari berbagai instansi pemerintah, lembaga swasta, masyarakat dan akademisi. Hasil identifikasi stakeholder disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Stakeholder

No	Aktor	Keterangan
1	Dinas Kehutanan	Instansi Pemerintah
2	BPDAS	Instansi Pemerintah
3	Gubernur	Instansi Pemerintah
4	Bappeda	Instansi Pemerintah
5	DPRD	Instansi Pemerintah
6	KPHL Mapilli	Instansi Pemerintah
7	Pelaku usaha	Lembaga swasta
8	LSM	Lembaga Masyarakat
9	Akademisi	Lembaga Pendidikan
10	Masyarakat sekitar kawasan	Masyarakat

Kesatuan Pengelola Hutan (KPHL) Mapili sebagai unit pelaksana sesuai dengan SK.651/Menhut-II/2010 memiliki peran dalam pengelolaan hutan secara lestari. Peran KPHL Mapilli ini didasari oleh Peraturan Menteri No: P.6/Menhut-II/2010 yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan.

PP 6 Tahun 2007 juga menjabarkan fungsi lain dari KPHL adalah membentuk lembaga pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan sertifikasi SDM, mengelola konflik, mengamankan hutan, dan memberantas *illegal logging*. Sedangkan kepentingan KPHL adalah terciptanya pengelolaan hutan yang baik sesuai aturan dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah dibuat.

Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Barat berperan sebagai implementor, fasilitator dan penyusun rancang bangun unit pengelolaan hutan serta pelaksana teknis dalam pengesahan rencana pengelolaan tahunan jangka panjang, menengah dan pendek unit KPHL. Dinas Kehutanan berkepentingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung (sesuai dengan PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan) Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan pemanfaatan

jasa lingkungan skala Provinsi dan Kab/Kota.

Gubernur dalam pembangunan KPHL Mapilli memiliki peran menyampaikan rancang bangun KPHL kepada menteri serta membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan Bupati/Walikota, dan/atau Kepala KPHL. Sedangkan kepentingan Gubernur dalam pengelolaan hutan terkait dengan terlaksananya kebijakan pengelolaan hutan pada sasaran kebijakan sesuai amanat undang-undang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Melakukan perencanaan tata ruang, tata batas terhadap kawasan KPHL Mapilli yang merujuk pada RTRW Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan kepentingan Bappeda dalam pengelolaan hutan terkait dengan perencanaan regional suatu wilayah/koordinasi.

Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) melaksanakan Kegiatan RHL yang berada di dalam kawasan yang merupakan wilayah kerja KPHL Mapilli. BPDAS memiliki peran dalam Perencanaan, pengelolaan dan monev serta memiliki kepentingan terkait dengan proyek rehabilitasi kawasan hutan (gerhan) yang dilaksanakan di dalam hutan lindung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai andil penting dalam penetapan peraturan dalam pembangunan KPHL serta pengawasan terhadap implementasi program kerja KPHL Mapilli dalam mewujudkan program kerja yang efektif. DPRD memiliki peran dalam

perencanaan dan penetapan peraturan pembangunan KPHL Mapilli. Sedangkan kepentingan DPRD dalam pengelolaan hutan lebih ke arah terkait dengan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan peraturan yang tidak sesuai.

Masyarakat sekitar kawasan yang dimaksud merupakan masyarakat yang tinggal dan bertani disekitar kawasan KPHL Mapilli yang memiliki peran serta dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah KPHL Mapilli. Sedangkan Masyarakat sekitar hutan memiliki kepentingan terkait dengan lahan tempat bekerja dan meneruskan kehidupan (pemberian akses untuk ikut mengelola hutan).

2. Pelaku usaha

Pelaku usaha kehutanan merupakan pihak swasta yang memiliki kepentingan memanfaatkan hasil hutan kayu/non kayu sebagai ladang penghasil. Pelaku usaha memiliki peran sebagai pengelola hasil hutan.

Lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud merupakan LSM yang ikut serta dalam penyelarasan pengelolaan SDH, serta penanaman kesadaran serta kebersamaan penjagaan dan peningkatan kesejahteraan. Perannya dalam pengelolaan hutan dan

wisata di KPHL adalah *monitoring* program yang dilaksanakan oleh KPHL. Kepentingan LSM dalam pengelolaan hutan terkait permasalahan lingkungan secara umum.

Akademisi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang fokus dalam bidang kehutanan, khususnya menekuni bidang penelitian, memiliki tujuan sebagai media belajar mahasiswa dan masyarakat dalam mempertahankan keberadaan hutan. Akademisi memiliki peran pengelola dan monev. Sedangkan akademisi berkepentingan terkait dengan adanya penelitian dalam ranah yang sama.

3. Klasifikasi Stakeholder

Penilaian berdasarkan atribut kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dilakukan dalam tahapan klasifikasi *stakeholder* (Reed dkk., 2009). Fletcher (2003), mengatakan bahwa pemangku kepentingan merupakan kelompok yang mempunyai tujuan dengan mempertimbangkan kepentingan dan pengaruh serta peran yang dimiliki.

Hasil penilaian terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam pembangunana KPHL Mapilli ditunjukkan pada Tabel 2. dan Tabel 3.

Tabel 2. Tingkat kepentingan *stakeholder*

No	Stakeholder	Nilai					Total	Rata-rata
		K1	K2	K3	K4	K5		
1	Dinas Kehutanan	3	5	3	2	2	15	3
2	BPDAS	4	4	4	5	3	20	4
3	Gubernur	5	3	2	3	2	15	3
4	Bappeda	4	5	3	4	4	20	4
5	DPRD	3	3	3	4	2	15	3
6	KPHL Mapilli	5	5	3	4	3	20	4
7	Pelaku usaha	2	2	3	2	1	10	2
8	LSM	3	2	1	2	2	10	2
9	Akademisi	3	3	4	5	5	20	4
10	Masyarakat sekitar kawasan	2	2	2	2	2	10	2

Keterangan: K1= Keterlibatan program, K2= Manfaat program, K3= Program yang diselenggarakan, K4= Kesedian *stakeholder*, K5= Kesesuaian tupoksi/aturan

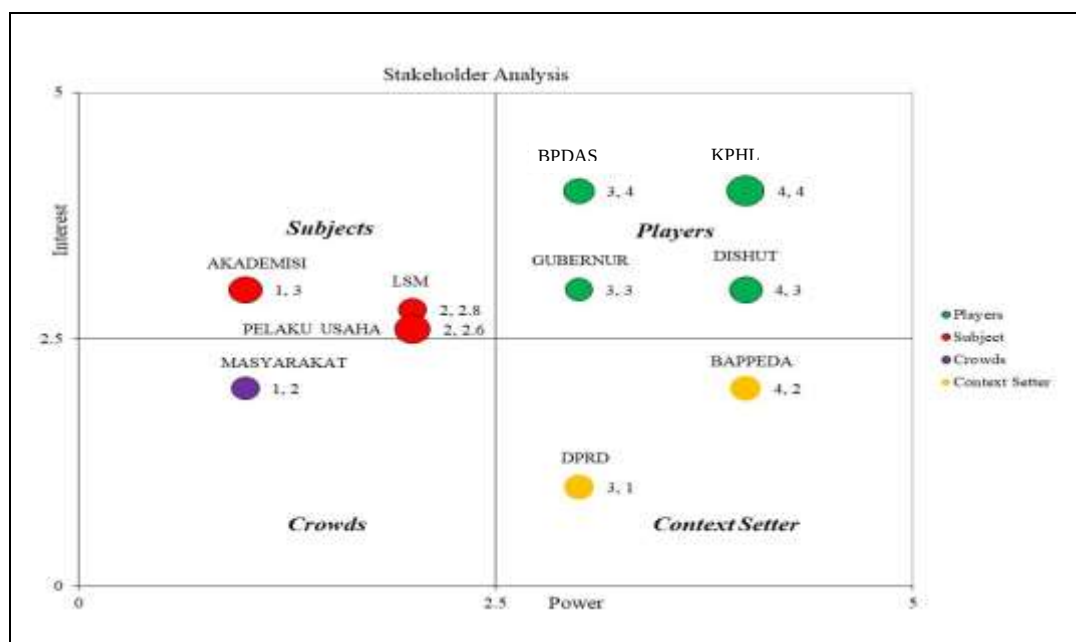
Tabel 3. Tingkat pengaruh *stakeholder*

No	Stakeholder	Nilai					Total	Rata-rata
		P1	P2	P3	P4	P5		
1	Dinas Kehutanan	5	4	4	3	4	20	4
2	BPDAS	5	4	3	2	1	15	3
3	Gubernur	3	3	3	3	3	15	3
4	Bappeda	2	3	2	2	1	10	2
5	DPRD	1	1	1	1	1	5	1
6	KPHL Mapilli	4	5	3	5	3	20	4
7	Pelaku usaha	4	2	2	3	2	13	2.6
8	LSM	3	3	2	3	3	14	2.8
9	Akademisi	1	1	1	1	1	5	1
10	Masyarakat sekitar kawasan	1	1	1	1	1	5	1

Keterangan: P1=Pengaruh wewenang instansi P2=Tipe kebijakan *stakeholder* P3=Kekuasaan sumberdaya strategis P4=Keahlian/spesialisasi instansi/lembaga P5=Pengaruh terhadap keberlangsungan program

Hasil klasifikasi menunjukkan adanya perbedaan peran antar *stakeholder* dalam tingkat kepentingan dan pengaruh pada pembangunan KPHL Mapilli. Nilai yang

didapatkan tiap *stakeholder* kemudian digambarkan dalam 4 bagian kuadran menggunakan matriks menurut Reed dkk., (2009) pada Gambar 1.



Gambar 1 Stakeholder mapping Pengelolaan hutan dan wisata di KPHL Mapilli

a. Key Players

Stakeholder yang termasuk dalam klasifikasi *key players* adalah KPHL Mapilli, BPDAS, DISHUT dan Gubernur. *Key players* memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan pengelolaan hutan dan wisata di KPHL Mapilli dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi program kerja hingga menjadikan KPHL

Mapilli mandiri sesuai aturan dan RPHJP yang telah dirancang sebelumnya.

b. Subject

Stakeholder yang termasuk dalam klasifikasi *subject* adalah LSM yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dalam memberikan penyadaran mengenai upaya pelestarian hutan dan pengembangan wisata serta. Pelaku usaha

kehutanan memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi hutan untuk mendapatkan keuntungan berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta menjadi investor di bidang wisata. Sedangkan akademisi kehutanan berperan memberikan konsep dalam pengelolaan hutan dan metode pengembangan obyek wisata di KPHL Mapili agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap masyarakat.

c. Context setter

Stakeholder yang termasuk dalam klasifikasi *context setter* adalah DPRD dan BAPPEDA. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 91 Tahun 2010 mengenai pembentukan organisasi kelembagaan dan penunjukan personil pada kesatuan pengelolaan hutan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. DPRD menjalankan peran melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan Bappeda lebih ke arah penetapan, penentuan wilayah administrasi dan tata batas dan perencanaan anggaran.

d. Crowd

Stakeholder yang termasuk dalam klasifikasi *crowd* adalah masyarakat sekitar kawasan. Peran yang dimiliki oleh masyarakat mencakup penyebaran informasi mengenai tata batas kawasan untuk meminimalkan konflik klaim lahan dalam kawasan serta ikut berpartisipasi untuk pengembangan wisata alam yang ada disekitar kawasan hutan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pada posisi *key player* dalam pengelolaan hutan KPHL Mapilli adalah KPHL Mapilli, BPDAS, DISHUT dan Gubernur, kemudian pada tabel *subject* terdapat LSM dan pada *context setter* terdapat DPRD dan BAPPEDA sebagai fungsi legislasi serta penentu wilayah administrasi serta pada klasifikasi *crowd* terdapat masyarakat yang menjadi penyebar informasi mengenai batas wilayah kawasan.

SIMPULAN

Hasil identifikasi pemangku kepentingan yang memiliki peran dan kepentingan pada pengelolaan hutan dan wisata alam di KPHL Mapilli terdapat sepuluh stakeholder yaitu BPDAS, Dishut Provinsi Sulbar, KPHL Mapilli dan Gubernur termasuk dalam kategori *players* yang memiliki peran pengawasan dan evaluasi program, Bappeda Provinsi Sulbar dan DPRD Provinsi termasuk dalam *context setter* yang memiliki peran dalam menentukan wilayah administrasi akademisi, LSM dan Pelaku usaha kehutanan termasuk dalam *subject* dan memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat serta Masyarakat termasuk dalam *crowd* yang memiliki peran penyebar informasi batas kawasan yang ada di KPHL Mapilli.

SARAN

Saran dalam upaya peningkatan pengelolaan hutan dan wisata di KPHL Mapilli antara lain adalah permasalahan yang terjadi di KPHL Mapilli adalah kurangnya pemahaman SDM tentang pengelolaan hutan, anggaran yang tidak memadai serta klaim lahan oleh masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong partisipasi semua pihak dengan memperkuat promosi mengenai potensi-potensi yang dimiliki KPHL Mapilli agar dapat menarik investor untuk bermitra, melakukan koordinasi, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KPHL serta mensinkronkan kegiatan yang terkait antar *stakeholder* demi mewujudkan pengelolaan hutan dan wisata di KPHL.

DAFTAR PUSTAKA

- Fletcher, K.J. 2003. The Central Brae Field, Blocks 16/07a, 16/07b, UK North Sea. *geological society, london, memoirs*. Vol. 20. No. 1, 183-190.
- Golar., Muis, H., Massiri, S.D., Rahman, A., Maiwa, A., Pratama, F., dan Baharuddin, R.F., dan Simorangkir, W.S. 2021. Can Forest Management Units Improve Community Access to the Forest. *International Journal of*

- Design & Nature and Ecodynamics*. Vol. 16. No. 5, 565-571.
- Golar., Muis, H., dan Simorangkir, W.S. 2022. Ragam Konflik dan Peran Fasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Dalam Upaya Resolusi Konflik Ternurial. *Jurnal WASIAN*. Vol. 9 No.1, 30-47.
- Hardjasoemantri, K. 1991. *Hukum perlindungan lingkungan: konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.
- Kartodihardjo, H. 2008. *Presentasi Pembangunan KPHL : Makalah kerangka hubungan kerja Antara lembaga sebelum dan setelah adanya KPHL*. Kerjasama dengan GTZ dan Dirjen Planologi, Kemenhut. Jakarta.
- Pratiwi, S. 2008. *Model pengembangan institusi ekowisata untuk penyelesaian konflik di Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., and Stringer, L. C. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*. Vol. 90. No. 5, 1933–1949.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Suharjito, D. 2017. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL) Kebijakan, implementasi dan masa depan. Multistakeholder Forestry Programme 3 (MFP3) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN).
- Suwarno, E. 2014. *Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPHL: Studi Kasus KPHLP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau*. Disertasi. Agricultural University (IPB).